

**UJIAN TENGAH SEMESTER GASAL**

*Diajukan Guna Memenuhi Ujian Tengah Semester Mata Kuliah*

*Kebijakan Publik dan Aplikasi, Yang Diampu Oleh:*

Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D.



Disusun Oleh:

Ardiansyah Kurniawan (2526061016)

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2025**

# PROSES AGENDA SETTING KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA

## BAB I LATAR BELAKANG

### A. AGENDA SETTING

Dikutip dari berbagai buku ajar kebijakan publik yang diterapkan di Indonesia, *Agenda Setting* kerap dijeaskan sebagai sebuah proses menjadikan isu masalah publik memperoleh perhatian dari pemerintah untuk menjadi agenda yang dibahas otoritas (Dewi, 2022). Biasanya lazim digunakan istilah “model siklus kebijakan” sebagai mulai dari peta tahap yang menjabarkan identifikasi masalah, penetapan agenda, formulasi, implementasi, dan evaluasi yang berguna memberikan gambaran struktur awal dan istilah kerja yang seragam. Namun dalam penerapannya, kerangka ini bersifat normatif dan kerap menyederhanakan kenyataan di lapangan yang jauh berliku, seperti misalnya tahap-tahapannya yang tumpang tindih, berulang, atau melompat yang diakibatkan tarik-menarik kepentingan, framing masalah yang berubah, serta adanya momentum dari politik tertentu. Untuk itu, ditemukan beberapa temuan studi bahwa baiknya model siklus kebijakan dianjurkan untuk dilengkapi, bukan mengganti total pendekatan siklus dengan kerangka dengan yang lebih peka terhadap non-linieritas dan pengaruh politisasi pada sebuah proses, agar analisis mampu menangkap umpan balik, konflik antarkoalisi, serta terbukanya dan tertutup jendela peluang secara dinamis (Nugroho, 2018; Subarsono, 2016; Winarno, 2021).

*Multiple Streams Framework* (MSF) yang dikemukakan oleh John Kingdon (1984) menyatakan bahwa suatu isu masalah publik akan naik ke sebuah agenda jika ketiga arus yaitu *Problem*, *Policy*, dan *Politics* bertemu dan terkorelasi sehingga membuka *policy window*. Arus masalah membuat isu tampak menjadi penting, arus kebijakan menyiapkan opsi yang layak dan dapat dipertahankan, arus politik menyediakan dukungan dan momentum. Pada saat yang tepat, aktor wirausaha kebijakan “menautkan” solusi dengan masalah dalam iklim politik yang kondusif, sehingga agenda pemerintah menangkap isu tersebut. Hal ini sejalan dengan rumusan Kingdon dalam beberapa publikasi berbahasa Indonesia yang menunjukkan bahwa penerapan MSF yang meningkat untuk menerangkan dinamika naik-turunnya perhatian terhadap kebijakan (Ria et al., 2024).

Model *Garbage Can* melengkapi kerangka MSF dengan menunjukkan bahwa dalam birokrasi yang kompleks, keputusan bukan selalu hasil urutan

rasional, melainkan dihasilkan dari pertemuan antara masalah, solusi, aktor, dan momentum dalam mengambil keputusan. Karena kondisi prioritas, prosedur, keterlibatan aktor sering tidak stabil, maka sering ditemukan bahwa solusi muncul terlebih dahulu sebelum masalah menemukan deskripsi yang cocok dengan kondisinya, maka hasil akhirnya sangat bergantung pada birokrasi sering menampilkan ambiguitas, mismatch solusi-masalah, dan hasil yang ditentukan oleh timing serta konfigurasi partisipasi, bukan semata rasionalitas linier (Nugroho, 2018; Winarno, 2021).

Secara teoretik, Agenda Setting menjelaskan lonjakan rasa penting pada sebagian isu karena adanya media yang memusatkan perhatian dan mengarahkan bingkai penilaian lewat penyorotan atribut substansial maupun afektif. Dasar empiriknya berasal dari McCombs dan Shaw (1972) dengan pengembangan mengenai transfer atribut dalam formulasi terbaru. Di Indonesia, pada masa pandemi covid-19 didapati perubahan distribusi perhatian yang memuat isu Covid-19 di beberapa platform. Secara keseluruhan, bukti ini memperkuat tesis bahwa ketika krisis meningkatkan ketergantungan informasi, media bukan hanya membuat isu tampak penting, tetapi juga menyalurkan atribut evaluatif yang membimbing cara publik menilai isu tersebut (Silvia et al., 2024).

## **B. AKTOR PENGGERAK KEBIJAKAN**

Berdasarkan dari kerangka *Advocacy Coalition Framework* (ACF), proses kebijakan dipahami sebagai arena kompetisi antar koalisi dalam *policy subsystem* yang dipersatukan oleh *belief system* bertingkat dari *deep core*, *policy core*, hingga *secondary aspects* yang digerakan oleh sumber daya seperti kses ke otoritas, opini publik, informasi, mobilisasi, finansial, dan kepemimpinan serta strategi advokasi yang berbeda-beda. dan strategi advokasi yang berbeda-beda. Dalam skema ini ada policy broker yang idealnya menengahi konflik, namun bukti empiris menunjukkan peran broker bisa ikut “berpolitik,” sehingga hasil kebijakan banyak ditentukan oleh konfigurasi aktor, timing, dan pertarungan nilai yang menegaskan bahwa kebijakan bukan semata urutan teknokratis, melainkan praktik politik yang nyata. Temuan studi dalam rujukan ini juga memperlihatkan bagaimana dua koalisi dengan orientasi nilai berbeda dapat saling berhadapan dan bergiliran memanfaatkan sumber daya untuk mendorong definisi masalah dan solusi yang mereka yakini (Harirah, 2019).

*Governance Network* menambahkan Kacamata jejaring kebijakan/tata kelola menilai kebijakan dari pola hubungan: tingkat keterikatan (kepadatan), posisi simpul kunci (sentralitas), dan peran penghubung (*brokerage*). Dalam layanan publik yang terdesentralisasi, tiga aspek ini menentukan apakah kolaborasi lintas-aktor berjalan efisien. Bukti dari studi Pujianti et al., (2022) memperlihatkan jejaring yang terpusat pada pemerintah, media tidak ikut serta,

petunjuk pelaksanaan belum ada sehingga tiap lembaga memakai SOP sendiri, penerimaan aduan saling bertumpuk, dan koordinasi tidak rutin semuanya menandakan kepadatan antar-klaster yang rendah, ketergantungan pada satu simpul sentral, dan kurang kuatnya peran perantara. Karena itu, rekomendasi utamanya ialah menata aturan bersama, mekanisme pelaporan satu pintu, serta penetapan broker formal agar ko-produksi benar-benar terwujud.

Dalam kerangka MSF, *Epistemic communities* (komunitas pakar) memainkan peran perantara strategis yang menghubungkan arus masalah, kebijakan, dan politik ketika jendela kebijakan terbuka. Komunitas pakar menyumbang konsensus pengetahuan yakni meliputi perumusan masalah, parameter indikator, dan alternatif kebijakan yang layak yang berfungsi menekan ketidakpastian dan memperjelas pilihan yang ada. Wirausaha kebijakan, pada saat yang sama, menggunakan modal relasional dan reputasional untuk menautkan solusi dengan masalah dalam iklim politik yang kondusif, melalui pembangunan koalisi, pergantian arena, serta pengelolaan narasi. Pada konteks desentralisasi dan ko-produksi, kapasitas menjembatani lintas-aktor inilah yang menentukan apakah momentum agenda dapat dikonversi menjadi perubahan terinstitusionalisasi. Temuan studi literatur menonjolkan karakteristik entrepreneur khususnya jaringan lintas organisasi, kemahiran meramu bukti dan bingkai isu, serta kecakapan koordinasi sebagai penjelas utama keberhasilan pengikatan arus dan keberlanjutan perubahan kebijakan (Aulia, 2023).

### C. AGENDA YANG MENDADAK BERUBAH

Punctuated Equilibrium Theory (PET) menjelaskan mengapa agenda kebijakan tampak “tenang lama lalu berubah mendadak.” Pada periode normal, umpan-balik negatif dan friksi institusional (prosedur, rutinitas, dan batas atensi) menahan deviasi sehingga perhatian dan kebijakan stabil. Namun, ketika terjadi focusing event (krisis, skandal, bencana), tiga mekanisme dapat menembus penahanan tadi: (1) pergeseran citra isu (*policy image shift*) yaitu peristiwa dramatis membuat definisi masalah melonjak dari teknis menjadi moral/keamanan/ekonomi sehingga mendongkrak urgensi; (2) perpindahan arena (*venue shopping*) yaitu aktor memindahkan isu ke forum yang lebih responsif dalam desentralisasi, banyaknya arena lokal (pemda, DPRD, OPD, layanan co-production) menurunkan ambang perubahan sehingga “lonjakan” lebih mudah terjadi; (3) pemrosesan informasi yang tak seimbang (*disproportionate information processing*) yaitu organisasi yang biasanya memproses isu secara serial tiba-tiba mengalokasikan perhatian besar, memicu umpan-balik positif (publik–media–legislator) yang mempercepat perubahan. Karena itu, PET memberi rasionalisasi kausal untuk perubahan agenda yang mendadak: bukan anomali, melainkan konsekuensi ketika penguat positif (peristiwa fokus, reframing, dan relokasi arena) mengalahkan friksi keseharian.

Literatur Indonesia yang mengkaji desentralisasi memanfaatkan PET untuk membaca mengapa sebagian isu tiba-tiba “naik panggung” di level daerah yakni saat peristiwa pemicu bertemu arena yang lebih permeabel dan jejaring koalisi yang siap memanfaatkan momentum sementara isu lain tetap tertahan dalam keselarasan (Patarai, 2021).

Dalam kerangka *New Institutionalism*, perubahan agenda yang tampak berubah mendadak merupakan manifestasi dari proses ketergantungan lintasan yang panjang, ketika akumulasi tekanan akhirnya melampaui ambang legitimasi dan diterjemahkan menjadi keputusan kebijakan. Meski demikian, tanpa penguncian institusional tanpa penguncian institusional melalui pembentukan aturan formal, standardisasi prosedur, dan peneguhan norma perubahan tersebut cenderung dinetralkan oleh mekanisme isomorfisme koersif, normatif, dan mimetik yang mendorong organisasi kembali pada pola yang dianggap sah. Perspektif ini menjelaskan sekaligus membatasi efek “lonjakan”: agenda dapat berubah cepat pada momen tertentu, tetapi keberlanjutannya bergantung pada proses institusionalisasi yang menyerap perubahan ke dalam aturan dan praktik yang berfungsi sehari-hari (Nadjib, 2024).

Sedangkan dalam kerangka *Narrative Policy Framework* (NPF) dinamika perubahan agenda yang terlihat tiba-tiba merupakan konsekuensi dari reformulasi cepat atas isu melalui struktur narasi setting, peran tokoh, alur, dan moral kebijakan yang beroperasi pada tataran mikro, meso, dan makro. Literatur menempatkan media dan pelaku kebijakan sebagai pengguna narasi yang secara sadar mengarahkan agenda melalui pemaknaan ulang peristiwa dan penonjolan solusi kebijakan. Seperti contohnya studi *Presidential Threshold* (2022) memperlihatkan bagaimana struktur narasi pro–kontra di media membingkai aktor dan argumen, meskipun pengaruhnya pada keputusan akhir dapat tertahan oleh kalkulasi politik institusional. Secara keseluruhan, NPF menawarkan rasionalisasi kausal terhadap perubahan agenda yang cepat yakni percepatan makna melalui narasi sekaligus menunjukkan bahwa keberlanjutan perubahan tetap ditentukan oleh konstelasi kepentingan dan struktur keputusan yang menyaring pengaruh narasi (Ahmad et al., 2022).

## **BAB II**

### **FORMULASI KEBIJAKAN**

#### **A. TAHAPAN KONSEPTUAL AGENDA SETTING**

##### **1. Identifikasi Masalah**

Pada fase awal, formulasi narasi menurut NPF menetapkan siapa melakukan apa terhadap siapa (tokoh/aktor), alur (urutan kejadian), dan

moral kebijakan (solusi yang dinilai tepat) struktur inilah yang mempercepat penegasan kausalitas (apa sebab utamanya) dan keharusan tindakan (apa yang harus dilakukan) sehingga isu cepat “terdefinisi” sebagai masalah publik yang menuntut respons segera. Di bidang farming media, agenda-setting bekerja serempak yaitu liputan mengangkat *highlight* isu sekaligus atribut penilaiannya, sehingga perhatian publik–elite terkonsentrasi dan “tenggat” keputusan seolah maju NPF sendiri mengakui peran media sebagai aktor/kekayaan koalisi yang mendorong penjadwalan perhatian dan *advancement* agenda melalui cerita kebijakan. Pada saat bersamaan, komunitas pakar dapat menyediakan indikator dan bukti yang mengurangi ambiguitas, sedangkan policy entrepreneurs menautkan definisi masalah tadi dengan policy stream yang feasible dan political stream yang kondusif ketika tiga arus MSF itu sinkron, jendela kebijakan terbuka dan lonjakan perhatian berubah menjadi momentum keputusan itulah sebabnya identifikasi masalah yang terstruktur (narasi–media–pakar) kerap tampil sebagai agenda setting yang tampak mendadak, padahal berbasis mekanisme yang dapat diterangkan (Kestiyoyuni, 2022).

## **2. Agregasi gagasan dan mengelola bukti**

Tahap agregasi gagasan dan orkestrasi bukti menjelaskan mengapa agenda dapat berubah secara cepat: wirausaha kebijakan merangkai paket kebijakan yang memenuhi kelayakan teknis, politik, dan administrasi, lalu meneguhkan paket tersebut melalui narasi kebijakan yang menyajikan alur, peran pelaku, dan moral/solusi sehingga siap diadopsi ketika jendela kebijakan terbuka. Perluasan dukungan dilakukan melalui jejaring kebijakan, yang memetakan aktor, relasi kekuasaan, strategi, dan pelembagaan sebagai prasyarat koordinasi lintas-simpul. Policy entrepreneurs menyiapkan policy packages yang layak secara teknis, politik, dan administrasi, jejaring kebijakan memperluas koalisi lintas-aktor, ACF mengidentifikasi *belief clash* & sumber daya, institusionalisme memberi sinyal kepada kelembagaan (Aulia, 2023).

## **3. Prioritas Isu dan *Decision Agenda***

Tahapan ini terjadi saat tiga arus MSF *problem*, *policy*, dan *politics* bertemu, namun karena perhatian publik masih sangat kecil, maka agenda memerlukan penguat berupa framing yang konsisten, peralihan arena (*venue shopping*), dan penguncian kelembagaan. Dalam kerangka NPF, narasi yang terstruktur (tokoh, alur, moral) berfungsi mengarahkan penjadwalan perhatian melalui media sebagai sumber daya koalisi; temuan pada kasus UU PDP menunjukkan bagaimana narasi kebocoran data menegaskan moral “perlunya payung hukum” dan mendorong percepatan keputusan (Ahmad et al., 2022). Selanjutnya, *venue shopping* menjaga momentum dengan memindahkan isu ke arena yang lebih reseptif sebagaimana studi Winongo dalam yang menandai terbukanya “arena baru”

dan peran broker dalam menjembatani koalisi yang berseberangan (Harirah, 2019). Akhirnya, institutional lock melalui regulasi, SOP, dan perangkat organisasi memastikan keputusan tidak kembali surut; pengalaman KLA Bandung memperlihatkan bahwa ketiadaan petunjuk pelaksana dan koordinasi yang tidak rutin melemahkan konsolidasi agenda meskipun ada kerangka regulatif formal (Pujianti et al., 2022).

## **B. MEKANISME KOALISI & NEGOSIASI DALAM AGENDA SETTING**

Mekanisme koalisi dan negosiasi dalam agenda *setting* dapat dijelaskan secara komplementer melalui lima lensa. *Advocacy Coalition Framework* menempatkan koalisi pada basis keyakinan kebijakan dan memandang negosiasi sebagai proses pertukaran sumber daya dan pembelajaran dalam subsistem. *Policy/governance networks* mengurai struktur relasional—kepadatan, sentralitas, dan *brokerage* yang menentukan distribusi pengaruh dan efektivitas koordinasi. *Iron triangle/issue networks* menyoroti risiko monopoli kebijakan dalam jejaring tertutup yang membatasi alternatif, sehingga strategi peralihan arena menjadi relevan. Epistemic communities menyediakan standar bukti melalui konsensus kausal dan indikator yang meningkatkan legitimasi pilihan. *Narrative Policy Framework* memerikan narasi koalisi (karakter, alur, moral) sebagai instrumen mobilisasi dukungan. Literatur Indonesia 2019–2024 mendemonstrasikan penerapan setiap lensa tersebut, menunjukkan bahwa percepatan agenda terjadi ketika keyakinan, relasi, bukti, dan narasi diorkestrasi secara konsisten dan ditempatkan pada arena yang tepat (Harirah, 2019).

## **C. KATALIS PERUBAHAN & STABILISASI PASCA-AGENDA**

Ketika *focusing events* memicu lonjakan perhatian dan *policy window* (MSF) terbuka, perubahan bisa tampak “mendadak” jika hanya ada rancangan yang siap di draf untuk segera dieksekusi (intuisi yang selaras dengan PET tentang kesiapsiagaan alternatif). Di Indonesia, lonjakan semacam itu sering “dikunci” oleh pengemasan narasi dan kerja media: studi NPF atas UU PDP menunjukkan bagaimana rangkaian protes #BlokirKominfo, kebocoran data, dan figur “Bjorka” membentuk alur krisis yang berujung pada percepatan pembahasan di DPR, dengan “moral cerita” berupa kebutuhan landasan hukum perlindungan data pribadi (Prawira & Yola, 2023). Karena itu, tiga langkah stabilisasi menjadi kunci: (1) framing yang konsisten agar dukungan tidak terfragmentasi, (2) venue shopping untuk mengalihkan isu ke arena yang lebih reseptif, termasuk lewat broker yang menautkan kubu, dan (3) penguncian kelembagaan melalui regulasi, SOP bersama, dan mekanisme koordinasi, sehingga perhatian yang berfluktuasi tidak mendorong rebound (Patarai, 2021).

### **BAB III**

#### **SIMPULAN KRITIS DAN PERTENTANGAN TEORI**

##### **1. Siklus vs MSF vs Garbage Can**

Model siklus kebijakan menyediakan peta kerja yang rapi dan mudah diajarkan, yaitu dari mulai identifikasi sampai evaluasi, namun bersifat normatif-linier dan kurang menangkap ketidakpastian praktik. Sebaliknya, Multiple Streams Framework (MSF) menekankan nonlinieritas melalui pertemuan arus problem-policy-politics yang kadang berlangsung tidak berurutan, sementara Garbage Can Model (GCM) menunjukkan bahwa keputusan dalam “organisasi anarkis-tertata” kerap lahir dari pertemuan kontingen antara masalah, solusi, peserta, dan momentum pilihan. Implikasi praktisnya: gunakan siklus sebagai “kerangka minimum” untuk menata proses dan akuntabilitas, manfaatkan MSF untuk membaca timing dan meraih policy window, dan pakai GCM untuk merancang mekanisme pengelolaan ambiguitas (misalnya protokol pre-commitment solusi, desain rapat sebagai choice opportunities, dan penataan aktor penghubung). Dengan kombinasi ini, analisis memperoleh keseimbangan antara disiplin prosedural dan kepekaan terhadap dinamika yang tidak linear (Winarno, 2021).

##### **2. MSF (Momentum) vs ACF (Koalisi)**

MSF menyoroti momen peluang bagaimana perhatian, solusi yang siap, dan dukungan politik disejajarkan oleh *policy entrepreneurs* sedangkan *Advocacy Coalition Framework* (ACF) menekankan struktur kekuatan yang relatif tahan lama: koalisi berbasis belief system yang bertarung memobilisasi sumber daya dan memonopoli definisi masalah. Sintesisnya adalah menempatkan policy entrepreneurs sebagai jembatan: mereka membaca window (MSF) sekaligus menggeser konfigurasi koalisi (ACF) melalui policy packages yang memadukan bukti, narasi, dan aliansi strategis. Di Indonesia 2019-2024 memperlihatkan kedua lensa ini saling melengkapi: peluang kebijakan jarang berdiri sendiri tanpa kerja koalisi, dan pergeseran koalisi lebih mungkin efektif ketika ditopang oleh momentum yang tepat (Aulia, 2023; Harirah, 2019).

##### **3. NPF/Framing (Narasi) vs Epistemic Communities (Bukti)**

Narrative Policy Framework (NPF) menjelaskan bagaimana cerita setting, karakter, alur, dan “moral” kebijakan memobilisasi dukungan dan mempercepat penjadwalan perhatian. Namun, komunitas pakar (epistemic communities) memasok standar bukti, indikator, dan konsensus kausal yang memastikan *methodological fit* serta mencegah bias naratif. Sintesis yang disarankan ialah *evidence-based storytelling*: narasi dirancang tunduk pada temuan pakar, bukan sebaliknya. Dengan begitu, framing tidak sekadar persuasif, melainkan dapat diaudit oleh ukuran validitas dan reliabilitas suatu kebutuhan di ekosistem kebijakan Indonesia, khususnya ketika kebijakan

berlandas pada regulasi dan standarisasi layanan publik (Ahmad et al., 2022; Prawira & Yola, 2023).

#### **4. PET/Critical Juncture (Lonjakan) vs New Institutionalism (Inersia)**

Punctuated Equilibrium Theory (PET) menerangkan pola tenang-panjang yang sesekali “terpuntir” oleh lonjakan akibat focusing events dan pemrosesan informasi yang tidak proporsional; sedangkan Institusionalisme Baru menekankan path dependence serta isomorfisme (koersif, normatif, mimetik) yang mengembalikan sistem pada jalur lazimnya. Jalan tengahnya ialah merancang dua fase: (i) momentum design, yakni menyiapkan alternatif “di rak” sebelum jendela kebijakan terbuka (selaras dengan PET), dan (ii) institutional locking pasca-agenda, yakni mengunci perubahan ke dalam aturan, SOP, standar profesi, serta mekanisme pengawasan agar tidak “rebound” oleh tekanan institusional (Nadjib, 2024; Patarai, 2021)

#### **5. Policy Networks (Pluralisme) vs Iron Triangle/Issue Networks**

Pendekatan jejaring kebijakan menekankan pluralisme dan kolaborasi lintas-aktor; namun konsep iron triangle/issue networks mengingatkan risiko policy monopoly ketika hubungan tertutup antara birokrasi, legislatif, dan kepentingan terorganisasi mengeraskan definisi masalah dan menyisihkan alternatif. Strategi sintesisnya: lakukan venue shift ke arena yang lebih terbuka (misalnya forum lintas-level atau partisipatif), tingkatkan transparansi proses, dan ukur struktur relasi secara *sistematis density* untuk melihat keterhubungan, centrality untuk memetakan simpul dominan, serta brokerage untuk mengidentifikasi penghubung yang perlu diperkuat. Temuan empiris Indonesia 2022–2024 mendukung pendekatan ini: efektivitas kolaborasi tidak ditentukan oleh jumlah aktor semata, melainkan oleh arsitektur relasi dan mekanisme pencegah capture yang dirancang sejak awal (Pujianti et al., 2022).

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, Z. H., Qodir, Z., & Akhdiva Elfi Istiqoh. (2022). Presidential Threshold Policy Toward the 2024 Election. *Journal of Home Affairs Governance*, 14(2022), 505–516.
- Aulia, M. (2023). Eksistensi Policy Entrepreneurs dalam Perubahan Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan*, 6(2), 595–601. <https://doi.org/10.32923/kjmp.v6i2.4019>
- Dewi, D. S. K. (2022). Kebijakan Publik: Proses, Implementasi dan Evaluasi. *UM Jakarta Press*, 268.
- Harirah, Z. (2019). Kerangka Advokasi Koalisi dalam Kebijakan Penataan Pemukiman Bantaran Sungai Winongo di Kota Yogyakarta. *Nakhoda*:

*Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 17(30), 128–141.  
<https://doi.org/10.35967/jipn.v17i30.7065>

- Kestiyoyuni, H. (2022). Identifikasi agenda setting dalam produksi berita detik.com “PSSI luruskan tudingan Shin Tae-Yong soal tak booking lapangan.” *Komunika: Journal of Communication Science and Islamic Dakwah*, 6(2), 81–92. <https://doi.org/10.32832/komunika.v6i2.7973>
- Nadjib, M. (2024). *Teori Administrasi Publik*. Media Penerbit Indonesia. <https://repository.mediapenerbitindonesia.com/453/>
- Nugroho, R. (2018). *Public Policy 6 – Edisi Revisi*. Elex Media Komputindo. <https://elexmedia.id/produk/detail/manajemen-bisnis/riant-nugroho/public-policy-6-edisi-revisi/9786020400075>
- Patarai, M. I. (2021). Desentralisasi Kebijakan dalam Otonomi Daerah. *Jurnal Sosial Teknologi*, 1(11), 1406–1417. <https://sostech.greenvest.co.id/index.php/sostech/article/view/237>
- Prawira, Y., & Yola, L. (2023). Analisis Narrative Policy Framework (NPF) dalam Kebijakan Undang-undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). *Jurnal Transformative*, 9(2), 204–226. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2023.009.02.5>
- Pujianti, F., Muhtar, E. A., & Setiawan, T. (2022). Jejaring Kebijakan dalam Pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Melalui Program Perlindungan dan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Anak di Kota Bandung. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 14(1), 457–463. <https://doi.org/10.24198/jane.v14i1.41373>
- Ria, C. A. K., Hariyoko, Y., & Basyar, M. R. (2024). Multiple Streams Framework in Perwali Number 5 of 2023 on the Child-Friendly Information Center as an Effort to Develop a Child-Friendly City in Surabaya. *Jurnal Administrasi Negara*, 30(2), 136–156. <https://doi.org/10.33509/jan.v30i2.2825>
- Silvia, A., Afif, A., & Hanum, R. S. (2024). Agenda-Setting Perubahan Dinamika Agenda serta Pengaruh terhadap Persepsi & Kebijakan Selama Covid-19. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 21629–21645. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/17673>
- Subarsono, A. G. (2016). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar. <https://www.tokopedia.com/tokobukubaru/analisis-kebijakan-publik-konsep-teori-dan-aplikasi-subarsono>
- Winarno, B. (2021). *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. CAPS (Center for Academic Publishing Service). <https://sirusa.bps.go.id/sirkec/sentra-caps>

{Bibliography}

# AGENDA SETTING KEBIJAKAN JALAN RUSAK DI LAMPUNG TIMUR

## BAB 1

### LATAR BELAKANG

#### A. Kondisi Empirik

Dewasa ini, informasi tentang kondisi jalanan di Provinsi Lampung selalu menjadi pembicaraan hangat terutama media masa. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung (News, 2023) Antara Lampung (2024) mengatakan bahwa kemantapan jalan provinsi di Lampung pada tahun 2024 kan meningkat menjadi 78,81 persen. Dibalik angka Provinsi yang semakin menunjukkan angka membaik, Lampung Timur masih menghadapi tantangan kerusakan signifikan. Data yang diperoleh dari Pemda Lampung Timur dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) melaporkan kemantapan jalan 49,17 persen pada tahun 2023 dengan lebih 50 persen ruas jalan yang ada di Lampung Timur dalam kondisi rusak hingga rusak berat. Hal ini diakibatkan beberapa faktor di antaranya realisasi program penyelenggaraan jalan hanya mencapai 74,24 persen karena keterbatasan anggaran (Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, 2024).

Data tersebut bermakna bahwa terdapat kesenjangan yang nyata antara kondisi makro di tingkat provinsi dan kondisi mikro di kabupaten. Selain itu, media lokal menyebutkan bahwa kondisi jalan ruas Sukadana-Bumi Nabung yang baru diperbaiki namun sudah rusak lagi telah menjadi sinyal kuat bagi masyarakat untuk perbaikan mutu akuntabilitas (VoxLampung, 2025). Dengan demikian isu jalan rusak di Lampung Timur bukan sekedar masalah teknis, melainkan masalah kebijakan yang menuntut penataan ulang prioritas, instrumen dan tata kelola.

Secara empiris, urgensi kebijakan didorong oleh kemantapan yang rendah, keterbatasan fiskal, serta tekanan opini publik. Oleh karena itu, pembacaan teoritik yang memadai diperlukan agar isu dapat ditransformasikan menjadi agenda institusional yang mendapat dukungan politik dan anggaran yang memadai.

#### B. Definisi, Cakupan, dan Kerangka Teori Agenda Setting

Secara Konseptual, *agenda setting* merujuk pada proses seleksi isu-isu permasalahan publik supaya masuk ke dalam agenda lembaga institusional pemerintahan sehingga isu tersebut memperoleh perhatian serta sumber daya untuk segera ditangani (Engkus, 2022; I. Rodiyah et al., 2022). Dalam kerangka ini *agenda setting* bukan sekedar isu prioritas, melainkan sebagai wadah kompetitif yang dipengaruhi definisi masalah, distribusi kekuasaan, dan dinamika antara publik dengan elit. Berikut beberapa kerangka teori yang dapat digunakan dalam membaca dinamika jalan rusak di Lampung Timur.



### 1. *Multiple Streams Framework (MSF)*

Teori ini menjelaskan bahwa isu bisa memasuki agenda apabila terjadi ketiga arus bertemu bersamaan pada saat terbukanya *policy window*. Ketiga arus tersebut diantaranya 1) arus masalah yang berisi indikator masalah, umpan balik, dan peristiwa. 2) arus kebijakan yaitu ketersediaan alternatif yang layak, dan 3) arus politik seperti mood publik, pergantian pemerintahan, serta tekanan kepentingan. Pertemuan ini biasanya dimediasi oleh *Policy Entrepreneur* yang mampu mengkolaborasikan ketiga arus tersebut dan mengemas proposal yang secara teknis layak, sesuai dengan nilai serta kompetibel secara anggaran (G. M. Ilman & Fitrie, 2021; Ria et al., 2024).

### 2. *Advocacy Coalition Framework (ACF)*

Teori ini menjelaskan bahwa perubahan agenda yang terjadi di dalam kebijakan subsistem melalui kompetisi koalisi advokasi yang berbagi *belief system* seperti *deep core beliefs*, *policy core*, hingga aspek sekunder serta memobilisasi sumber daya seperti pengetahuan, jejaring, dan akses institusi serta strategi seperti litigasi, lobi, dan *venue shopping* dalam suatu periode waktu jangka menengah – panjang (Z. Harirah, 2019).

### 3. *Mode Framing/ Agenda Media*

Model ini menunjukkan bahwa cara sebuah isu didefinisikan akan mempengaruhi skala prioritas siapa atau apa yang diposisikan sebagai penyebab permasalahan, bagaimana evaluasi moral diberikan, dan solusi seperti apa yang dapat direkomendasikan sebagai penyelesaian permasalahan. Dengan adanya teori ini, maka dapat pendefinisian masalah, atribusi sebab, penilaian moral, dan rekomendasi kebijakan yang mengarahkan pandangan publik dengan pembuat kebijakan sehingga mempengaruhi kemungkinan sebuah isu masuk ke dalam *agenda setting* (Palupi & Irawan, 2020).

### 4. *Punctuated Equilibrium (PE)*

Teori ini menyatakan bahwa perubahan kebijakan tidak selalu bertahap, panjangnya periode stabilitas akan terputus akibat adanya lonjakan fokus yang menyeroskan pergeseran citra kebijakan, menghasilkan redistribusi baik perhatian maupun sumber daya dalam waktu yang singkat.

### 5. *Incrementalism*

Dalam teori ini disebutkan bahwa pengambilan kebijakan terhadap perubahan bertahap karena kendala informasi, politik, anggaran, dan kapasitas birokrasi mengakibatkan kebanyakan keputusan bersifat *Muddling Through* alih-alih mengambil keputusan perombakan secara total (Abdoellah & Rusfiana, 2016).

Perlu dipahami bahwa kerangka-kerangka tersebut memiliki peran bukan saling berlawanan, melainkan bersinergi saling melengkapi satu sama lain.. Dengan kata lain, MSF membantu membaca momentum, ACF mengurai peta aktor kebijakan dan koalisi, *framing* menata narasi, PE membaca lonjakan perhatian, dan *incrementalism* mengingatkan pentingnya realisme implementasi. Definisi dan lensa teoritik diatas memberikan landasan konseptual bagi perumusan strategi *agenda setting* yang lebih peka terhadap

data, dinamika politik, jaringan aktor pemangku kepentingan, serta kebutuhan komunikasi publik.

C. Data, Arena Kewenangan, Konsekuensi Kebijakan

Untuk menjaga ketepatan intervensi, perlu ditegaskan pada peran kewenangan birokrasi pada ruas jalan pada level Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Tabel panjang ruas jalan menurut BPS Provinsi Lampung menyediakan pijakan pembagian tugas dan penganggaran pemangku kewenangan. Dari sisi kebijakan makro, program Inpres Jalan Daerah (IJD) yang berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah (President of the Republic of Indonesia, 2023) disebut berkontribusi terhadap peningkatan kemandapan kondisi ruas jalan di tingkat provinsi pada tahun 2024 (Antara News, 2023). Berdasarkan data diatas, dapat di tarik sebuah benang merah bahwa terdapat peluang untuk menyelaraskan program pembangunan ruas jalan di kabupaten dengan bantuan pemerintah pusat d provinsi, selagi masih dalam perencanaan berbasis data dan prioritas.

Tabel 1Ruas Panjang Jalan Di Provinsi Lampung 2024

| Kabupaten/Kota      | Panjang Jalan Negara (km) | Panjang Jalan Provinsi (km) | Panjang Jalan Kabupaten/Kota (km) | Jumlah Panjang Jalan(km) |
|---------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Lampung Barat       | 87                        | 113                         | 669                               | 869                      |
| Tanggamus           | 79                        | 197                         | 939                               | 1215                     |
| Lampung Selatan     | 147                       | 105                         | 1204                              | 1215                     |
| Lampung Timur       | 167                       | 135                         | 1884                              | 2186                     |
| Lampung Tengah      | 144                       | 270                         | 1120                              | 1534                     |
| Lampung Utara       | 90                        | 156                         | 1025                              | 1271                     |
| Way Kanan           | 76                        | 261                         | 1055                              | 1393                     |
| Tulangbawang        | 144                       | 68                          | 799                               | 1011                     |
| Pesawaran           | 22                        | 142                         | 1054                              | 1218                     |
| Pringsewu           | 27                        | 40                          | 690                               | 756                      |
| Mesuji              | 38                        | 41                          | 512                               | 590                      |
| Tulang Bawang Barat | 4                         | 130                         | 596                               | 730                      |
| Pesisir Barat       | 205                       | 12                          | 460                               | 677                      |
| Kota Bandar Lampung | 60                        | 9                           | 417                               | 486                      |
| Kota Metro          | 10                        | 16                          | 387                               | 413                      |
| Lampung             | 1299                      | 1696                        | 12811                             | 15805                    |

(Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025)

Konsekuensinya, desain kebijakan harus mempertimbangkan keterbatasan anggaran, urgensi dari ruang prioritas, dan kesiapan pelaksanaan. Dengan memperhatikan arena kewenangan, koordinasi lintas level menjadi persyaratan agar manfaat dari kebijakan lebih cepat terasa bagi masyarakat dan pelaku ekonomi (Patarai, 2020).

BAB II  
FORMULASI KEBIJAKAN

A. Agenda Setting

Dalam konteks perbaikan infrastruktur jalan di Lampung Timur, pendekatan yang paling efektif untuk menetapkan agenda kebijakan melibatkan penggabungan tiga komponen penting, yaitu *Multiple Streams Framework* (MSF) atau perhitungan momentum, *Advocacy Coalition Framework* (ACF) atau orkestrasi jejaring, dan *framing* sesuai dengan kebutuhan publik. Alur sinergitas antar komponen yang pertama, MSF menekankan pentingnya menuntun analisi masalah dengan menggunakan indikator kemandapan jalan

sejumlah 49,17% dan proporsi utama jalan yang rusak atau rusak berat sejumlah >50%(pemerintah Kabupaten Lampung Timur, 2024) . Data ini menjadi pedoman dalam mengidentifikasi urgensi perbaikan infrastruktur jalan. Selain itu, arus kebijakan yang terkait dengan pendanaan seperti IJD (Inspres Jalan Daerah) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) serta arus politik yang mencakup tekanan publik dan elit, harus di kolaborasikan dengan cermat dalam sebuah “*police window*” yang menciptakan peluang tindakan kebijakan yang lebih cepat dan tepat. Dalam hal ini, kehadiran *policy entrepreneurs* sangat penting untuk menggabungkan ide, dukungan, dan momentum dalam proses pembentukan kebijakan yang efektif (M. Ilman & Fitrie, 2021; Antara News, 2023; Ria et al., 2024;).

Pada saat yang sama, pendekatan ACF mendorong pembentukan Koalisi Jalan Mantap Lampung Timur, yang terdiri dari berbagai pihak seperti dinas teknis, DPRD, komunitas pengguna jalan (misal Organisasi Angkutan Darat), akademisi, dan media. Koalisi ini bertujuan untuk mengonsolidasikan *belief sistem* yang menekankan keselamatan, efisiensi biaya, dan akses layanan. Melalui koalisi ini semua pihak bisa menyuarakan kepentingan mereka, memastikan bahwa kebijakan yang diusulkan mencerminkan kebutuhan yang luas dan mendalam. Agar kebijakan ini menyebar sampai di kalangan publik, *framing* media berbasis bukti sangat penting. Oleh karena itu, narasi yang disebarkan tentang “kerusakan fisik” harus dialihkan menjadi isu yang lebih konkret dan mudah di pahami oleh publik, seperti “risiko keselamatan di jalan raya dan biaya ekonomi: yang ditimbulkan akibat kerusakan infrastruktur jalan (Palupi & Irawan, 2020; VoxLampung, 2025).

Dengan demikian *agenda setting* yang efektif di Lampung Timur harus menggabungkan perhitungan momentum (MFS), orkestrasi jejaring (ACF), dan *framing* yang dapat dipahami oleh masyarakat umum, beserta dukungan oleh data lapangan yang valid dan indikator resmi dari pemerintah daerah serta lembaga terkait. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan sinergi antara kebijakan teknis, dukungan politik, dan kebutuhan masyarakat, serta menghasilkan kebijakan yang lebih responsif dan berkelanjutan dalam menyelesaikan permasalahan jalan rusak di Lampung Timur.

## **B. Desain Instrumen**

Secara operasional , keberhasilan kebijakan publik sangat bergantung pada kecocokan instrumen yang digunakan dengan karakter masalah yang dihadapi serta kapasitas pelaksanaan yang ada. Beberapa instrumen yang dapat digunakan antara lain adalah rekonstruksi koridor jalan prioritas berdasarkan Indeks Kemantapan Jalan atau IRI (*Internasional Roughness Indeks*) dan keselamatan jalan raya, pemeliharaan rutin dan berkala, kontrak berbasis kinerja, rehabilitasi drainase, serta pengendalian beban berlebihan kendaraan (ODOL). Instrumen-instrumen ini tidak hanya fokus pada pembangunan dan perbaikan fisik saja, tetapi juga mempertimbangkan aspek keselamatan dan efisiensi dalam jangka panjang. Prinsip dasar dari sebuah kebijakan adalah apa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, bukan hanya apa yang dinyatakan atau diungkapkan dalam dokumen kebijakan (Dewi, 2022).

Penerapan kontrak berbasis kinerja menjadi hal yang penting dalam menjaga kualitas dan hasil yang diinginkan. Kontrak ini tidak hanya memuat

target kinerja yang jelas, tetapi juga menyesuaikan struktur insentif untuk mendorong kepatuhan para pelaksana. Hal ini bertujuan agar para pelaksana memiliki motivasi untuk mencapai hasil optimal, karena imbalan dan juga sanksi yang diberikan sesuai dengan hasil yang tercapai. Selain itu, audit mutu independen dan pelibatan publik dalam pelaksanaan kebijakan sangat penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi. Dengan adanya mekanisme audit serta keterlibatan masyarakat, kualitas dan transparansi pelaksanaan kebijakan dapat lebih terjaga, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses tersebut (I. Rodiyah et al., 2022)

Desain instrumen kebijakan infrastruktur jalan di Lampung Timur harus menyeimbangkan berbagai aspek, yakni kelayakan teknis, politik, dan administratif. Hal ini meliputi penggabungan antara rekonstruksi jalan berdasarkan skala prioritas, pemeliharaan rutin dan berkala, serta pendanaan yang bersumber dari berbagai kanal, termasuk tata kelola yang memastikan mutu dan transparansi. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada bagaimana instrumen dipilih dapat diterapkan secara efisien, mampu mengakomodasi kepentingan berbagai pihak, serta menjaga akuntabilitas dalam setiap tahapan pelaksanaannya.

### C. Arena keputusan, Strategi Advokasi, dan Komunikasi Publik

Dalam rancangan sebuah kebijakan publik, pemilihan arena (*venue*) pengambilan keputusan merupakan langkah strategis yang akan mempengaruhi kecepatan, kualitas, dan akuntabilitas kebijakan yang akan dikeluarkan. Strategi *venue shopping* yaitu sebuah langkah memindahkan isu ke arena yang lebih kondusif patut di tempuh secara struktur dengan memanfaatkan siklus dan kanal anggaran yang tepat, misalnya relokasi anggaran melalui APBD-Perubahan, pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK), atau bisa melalui advokasi untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat pada ruas-ruas strategis yang memiliki dampak ekonomi tinggi (Patarai, 2020).

Di saat yang bersamaan, perlunya pembangunan legitimasi yang dibentuk melalui advokasi oleh beberapa pihak yang menekankan seperti penguatan jejaring aktor yang terlibat (pemerintah, DPRD, komunitas pengguna jalan, akademisi, dan media). Kemudian penyedia data dan bukti (audit kebutuhan, baseline kondisi, peta prioritas), serta pemanfaatan farming media untuk memperluas jangkauan publikasi dan menjaga akuntabilitas publik. Konsolidasi tiga pilar ini akan menekankan ruang *policy drift* dan memperjelas koalisi pendukung kebijakan (Aprianto et al., 2024; Bakry et al., 2025).

Pada ranah komunikasi publik, *framing* yang konsisten dan berbasis data menjadi perekat narasi antara pemerintah, DPRD, dan komunitas; sebagai ilustrasi, menyandingkan informasi “kemantapan provinsi 78,81% pada 2024” dengan target dan tahapan kabupaten akan memperjelas pembagian tanggung jawab, menyinkronkan prioritas lintas level pemerintahan, serta menjadi rujukan monitoring–evaluasi yang transparan bagi warga (ANTARA News, 2024). Dengan demikian, kombinasi *venue shopping* yang presisi, advokasi berbasis bukti, dan *framing* yang ajek membentuk desain kebijakan yang lebih cepat, sah secara hukum, dan berorientasi hasil.

#### D. Evaluasi dan Umpan Balik

Penggunaan evaluasi tidak hanya diletakan pada bagian penutup, melainkan dimulai sejak hulu proses perumusan kebijakan harus dilaksanakan evaluasi agar tujuan, indikator, metode pengukuran, dan tata kelola data bisa terkunci dari awal proses. Kerangka hasil tiga tingkat yakni, *Output*, *Outcome*, dan *Impact* memunculkan garis logika yang jelas dari aktivitas yang memiliki manfaat ke publik. Pada level *output* indikator seperti panjang kilometer daro ruas jalan yang akan di tangani serta kepatuhan terhadap spesifikasi teknis, memastikan akuntabilitas langsung terhadap kontrak dan rencana kerja. Kemudian pada level *outcome*, indikator kinerja jalan dari kondisi yang lazim seperti kondisi kemantapan jalan, persentase jalan dalam kondisi baik, sedang maupun yang sesuai dengan *International Roughness Indeks* (IRI). Pada level *impact*, indikator seperti waktu tempuh, angka kecelakaan jalan raya, dan biaya logistik yang menangkap kebermanfaatan terhadap sosial-ekonomi. Rancangan evaluasi yang terintegrasi seperti ini seperti ini selaras dengan tradisi analisis kebijakan yang menautkan tahapan formulasi-implementasi-evaluasi, sehingga proses kebijakan berlangsung iteratif dan berbasis bukti, bukan hanya sekedar *post-hoc justification* (Engkus, 2022; I. F. Rodiyah et al., 2022).

### BAB III

#### SINTESIS KRITIS DAN PERTENTANGAN TEORI

Ketegangan dalam melaksanakan implementasi kebijakan sering kali mencakup beberapa pendekatan yang berbeda. Salah satunya antara pendekatan *Multi Stream Framework* (MSF) dengan pendekatan *Incrementalism*. MSF menekankan agar perubahan dilaksanakan agar cepat melalaui lompatan kebijakan besar, sementara *incrementalism* mengutamakan perbaikan kecil yang berkelanjutan. Kedua pendekatan ini dapat dijalankan secara bersamaan melalui strategi *dual-track*, yang menciptakan *quick wins* yang memberi hasil langsung, sambil menyiapkan paket reformasi yang siap diadopsi untuk waktu jangka panjang. Hal ini sejalan dengan Ilman dan Fitrie (2021) serta Abdoellah dan Rusfiana (2016) yang menyatakan bahwa kedua pendekatan ini bisa mempercepat perubahan yang terencana dan inklusif.

Ketegangan kedua adalah antara *Advocacy Coalition Framework* (ACF) dan pendekatan insentif rasional. ACF menekankan pentingnya koalisi aktor dan sistem keyakinan dalam membentuk kebijakan, di mana aktor-aktor utama dengan kepentingan bersama berusaha mempengaruhi keputusan kebijakan. Sementara itu, pendekatan insentif rasional lebih menekankan desain insentif dan sanksi yang diterapkan pada tingkat proyek atau kontrak sebagai penggerak utama perubahan perilaku di lapangan. Dalam hal ini, desain kebijakan yang memperhitungkan insentif dan sanksi yang tepat dapat memastikan bahwa kebijakan tidak hanya diterima tetapi juga diimplementasikan secara efektif, tanpa bergantung sepenuhnya pada pengaruh koalisi atau sistem keyakinan yang ada (H. Harirah, 2019; I. Rodiyah et al., 2022).

Ketegangan ketiga berkaitan dengan peran *framing* dan *evidente* dalam pembuatan kebijakan. Narasi yang tidak didukung oleh data yang valid dapat menyebabkan terjadinya gelembung kebijakan yang pada akhirnya tidak berujung pada hasil yang diinginkan, sementara data yang hanya disajikan tanpa narasi yang jelas dapat kesulitan untuk memobilisasi dukungan dari berbagai pihak yang terlibat. Oleh karena itu, keseimbangan antara narasi yang membangun pemahaman kolektif dan data yang relevan sangat diperlukan untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya dapat diterima tetapi juga diimplementasikan dengan sukses (Palupi & Irawan, 2020; VoxLampung, 2025).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta. <https://eprints.ipdn.ac.id/2476/>
- Aprianto, A., Solissa, M. I., Jasman, J., Savitri, R., & Alfurqan, A. (2024). Strategi Advokasi Kebijakan Publik Berbasis Multipihak pada Isu Kekerasan Berbasis Gender Online. *JPG (Journal of Gender, Policy & Governance)*. <https://madika.or.id/jpg/index.php/jpg/article/view/498>
- Bakry, G. N., Rahman, A., & Ramadhan, M. H. (2025). Discourse Network Analysis of CNN's "Indonesia Gelap": Advocacy Coalition and Public Sphere. *Kajian Jurnalisme*, 9(1). <https://doi.org/10.24198/jkj.v9i1.62553>
- Dewi, D. S. K. (2022). *Kebijakan Publik: Proses, Implementasi dan Evaluasi*. Samudra Biru. [https://eprints.umpo.ac.id/10663/1/Buku Ajar Kebijakan Publik.pdf](https://eprints.umpo.ac.id/10663/1/Buku_Ajar_Kebijakan_Publik.pdf)
- Engkus, E. (2022). *Kebijakan Publik: Konsep, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi serta Pembaruan*. PT Kimshafi Alung Cipta. <https://digilib.uinsgd.ac.id/82934/>
- Harirah, H. (2019). Advokasi Kebijakan: Analisis Gerakan Sungai Winongo Yogyakarta. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 17(30), 128–141. <https://doi.org/10.35967/jipn.v17i30.7065>
- Harirah, Z. (2019). Advokasi Kebijakan: Analisis Gerakan Sungai Winongo. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. <https://doi.org/10.35967/nkh.v0i0.229>
- Ilman, G. M., & Fitrie, R. A. (2021). Agenda Setting Kebijakan Pilkada Serentak Tahun 2020 dengan Menggunakan Multiple Streams Framework. *Jurnal Transformative*, 7(1), 82. <https://transformative.ub.ac.id/index.php/jtr/article/view/260>
- Ilman, M., & Fitrie, A. (2021). Agenda Setting Kebijakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Jawa Timur: Multiple Streams Framework. *Jurnal Transformative*, 7(1), 82–92. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2021.007.01.4>
- Lampung, B. P. S. P. (2025). *Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Provinsi Lampung (km), 2024*. <https://lampung.bps.go.id/id/statistics-table/3/U0VOeFZEZFNiVnByUkdGMlNrOTFVVGRHY1ZkVGR6MDkjMw%3D%3D/panjang-jalan-menurut-kabupaten-kota-dan-tingkat-kewenangan-pemerintahan-di-provinsi-lampung--km---2024.html>
- News, A. (2023). *Kemen PUPR Targetkan Pengerjaan Inpres Jalan Daerah Selesai Desember*. <https://www.antaranews.com/berita/3794865/kemen-pupr-targetkan-pengerjaan-inpres-jalan-daerah-selesai-desember>

- Palupi, M. F. T., & Irawan, R. E. (2020). Analisis Framing Pemberitaan Kebijakan Pemerintah Terkait Ketenagakerjaan (Model Robert N. Entman). *Representamen: Jurnal Komunikasi*.  
<https://repository.usm.ac.id/files/2/26/26441/REPRESENTAMEN-Maria-Fransisca-Tri-Palupi-2020.pdf>
- Patarai, M. I. (2020). *Kebijakan Publik Daerah: Posisi dan Dimensinya dalam Perspektif Desentralisasi Kebijakan*. IPDN Press.  
[https://eprints.ipdn.ac.id/5847/1/KEBIJAKAN\\_PUBLIK\\_DAERAH.pdf](https://eprints.ipdn.ac.id/5847/1/KEBIJAKAN_PUBLIK_DAERAH.pdf)
- President of the Republic of Indonesia. (2023). *Presidential Instruction Number 3 of 2023 on the Acceleration of Regional Road Connectivity Improvement*. Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia. 145524, 1–6.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/269973/inpres-no-3-tahun-2023>
- Ria, C. A. K., Hariyoko, Y., & Basyar, M. R. (2024). Multiple Streams Framework sebagai Basis Penetapan Perwali No. 5/2023 tentang Kota Layak Anak Surabaya. *Jurnal Administrasi Negara*, 30(2), 136–156.  
<https://ejournal.stialan.ac.id/index.php/JAN/article/view/4865>
- Rodiyah, I., Choiriyah, I. U., & Sukmana, H. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Umsida Press. <https://doi.org/10.21070/2022/978-623-464-036-6>
- Rodiyah, I. F., Nurcahyo, D., Zaki, M., & Rachman, N. (2022). *Buku Ajar Pengantar Ilmu Administrasi Publik*. Umsida Press.  
<https://doi.org/10.21070/2022/978-623-464-036-6>
- Timur, P. K. L. (2024). *Informasi Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah (LAKIP) 2023*.  
<https://www.lampungtimurkab.go.id/show-pdf/27.-Informasi-Laporan-Akuntabilitas-dan-Kinerja-Tahunan-Pemerintah-Daerah-2023.pdf>
- VoxLampung. (2025). *Baru Diperbaiki, Jalan Sukadana–Bumi Nabung Kembali Rusak! Warga Ngadu ke Medsos*. <https://voxlampung.com/tag/jalan-rusak-lampung/>